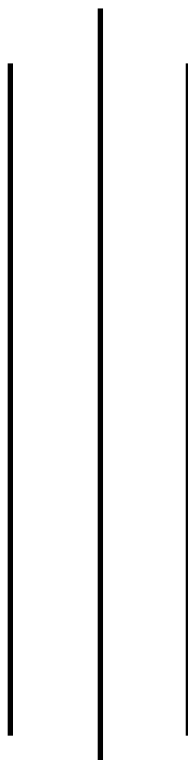




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

Baa, 17 Januari 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi – fungsi Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka dengan ini kami sampaikan secara singkat “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) “Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024. Disadari secara substansi, redaksional maupun outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.

Baa, 17 Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Rote Ndao,



Meilon B. Sula, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19660512 200604 1 022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	1
1.3 Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao	2
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENCAPATAN DAN BELANJA DAERAH	6
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
3.1 Capaian Kinerja Program	8
3.2 Realisasi Anggaran	9
3.3 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	10
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA. Sebelumnya	10
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	11
BAB V PENUTUP	

**LPPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN HASIL PELAKSANAANNYA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rote Ndao, yang diharapkan mampu menjawab semua persoalan Kepegawaian yakni membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut yang dijabarkan dalam berbagai kebijakan, Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao maka perlu adanya Pertanggungjawaban dalam Bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terdiri dari sub kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
 - Pengelolaan Data Kepegawaian
- Mutasi dan Promosi ASN yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
- Pengembangan Kompetensi ASN yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terdiri dari sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

II. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 4.888.746.234,- realisasinya sebesar Rp. 4.199.000.160,- (85.89 %) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.888.746.234,- realisasinya sebesar Rp. 4.199.000.160,- (85.89%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (0.00 %). Selanjutnya rincian pagu anggaran belanja dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Pagu dana sebesar Rp. 2.437.071.502,- realisasinya sebesar Rp. 2.138.474.010,- (87,75%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 34.538.750,- realisasinya sebesar Rp. 34.412.600,- (99,63%) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut;

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 24.874.000,- (99,50%);
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.538.750,- realisasinya sebesar Rp. 9.538.600,- (100,00%).

2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.124.496.682,- realisasinya sebesar Rp. 1.829.549.510,- (86,12%) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.058.091.682,- realisasinya sebesar Rp. 1.763.147.510,- (85,67%);
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 66.405.000,- realisasinya sebesar Rp. 66.402.000,- (100,00%).
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 13.039.000,- (96,59%) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut;
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 13.039.000,- (96,59%).
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 194.136.770,- realisasinya sebesar Rp. 193.079.200,- (99,46%) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.395.685,- realisasinya sebesar Rp. 30.387.800,- (99,97%);
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.445.085,- realisasinya sebesar Rp. 25.444.800,- (100,00%);
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 138.296.000,- realisasinya sebesar Rp. 137.246.600,- (99,24%).
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.200.000,- realisasinya sebesar Rp. 12.675.250,- (85,54%) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.200.000,- realisasinya sebesar Rp. 12.675.250,- (96,02%).

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.199.300,- realisasinya sebesar Rp. 55.718.450,- (97,41%) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut ;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 52.670.500,- realisasinya sebesar Rp. 51.189.650,- (97,19%);
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.528.800,- realisasinya sebesar Rp. 4.528.800,- (100,00%).
- b. Program Kepegawaian Daerah dengan alokasi dana Rp. 2.122.996.779,- realisasinya sebesar Rp. 1.756.818.850,- (82,75%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 546.109.719,- realisasinya sebesar Rp. 505.029.550,- (92,48%) serta rincian sub kegiatan sebagai berikut;
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.427.033,- realisasinya sebesar Rp. 16.118.000,- (98,12%);
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan alokasi dana sebesar Rp. 498.629.179,- realisasinya sebesar Rp. 459.298.900,- (92,11%);
 - Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.800.901,- realisasinya sebesar Rp. 18.329.050,- (97,49%);
 - Pengelolaan Data Kepegawaian dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.252.606,- realisasinya sebesar Rp. 11.283.600,- (92,09%).

2. Mutasi dan Promosi ASN dengan alokasi dana Rp. 272.446.855,- realisasinya sebesar Rp. 78.453.900,- (28,80%) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut ;
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 43.367.210,- realisasinya sebesar Rp. 43.298.850,- (99,84%);
 - Pengelolaan Promosi ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 229.079.645,- realisasinya sebesar Rp 35.155.050,- (15,35%).
3. Pengembangan Kompetensi ASN dengan alokasi dana Rp. 1.272.165.775,- realisasinya sebesar Rp. 1.141.071.800,- (89,70%) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut ;
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.596.716,- realisasinya sebesar Rp. 40.591.650,- (99,99%);
 - Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.999.417,- realisasinya sebesar Rp. 27.888.200,- (92,96%);
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.201.569.642,- realisasinya sebesar Rp. 1.072.591.950,- (89,27%).
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan alokasi dana Rp. 32.274.430,- realisasinya sebesar Rp. 32.263.600,- (99,97%) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut ;
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur dengan alokasi dana Rp 5.154.955,- realisasinya sebesar Rp 5.147.300,- (99,85%)
 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan alokasi dana Rp. 27.119.475,- realisasinya sebesar Rp. 27.116.300,- (99,99%).
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi dana sebesar Rp. 328.677.953,- realisasinya sebesar Rp. 303.707.300,- (92,40%) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan alokasi dana sebesar Rp. 328.677.953,- realisasinya sebesar Rp. 303.707.300,- (92,40%) dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut ;
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan alokasi dana Rp. 328.677.953,- realisasinya sebesar Rp. 303.707.300,- (92,40%).

III. TINGKAT PENCAPAIAN SPM

Pencapaian program yang dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah 85,89 % dengan rincian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan capaian 87,75%;
2. Program Kepegawaian Daerah dengan capaian 82,75 %;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan capaian 92.40%.

IV. JUMLAH PEGAWAI PENYELENGGARA URUSAN WAJIB

Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao, didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut : 18 (delapan belas) orang berpendidikan S-1, 3 (tiga) orang berpendidikan Diploma dan 4 (empat) orang berpendidikan SMA.

Komposisi Pangkat dan Golongan pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut : Golongan II/c sebanyak 1 (satu) orang, Golongan II/d sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III/a sebanyak 4 (empat) orang, Golongan III/b sebanyak 4 (empat) orang, Golongan III/c sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III/d sebanyak 8 (delapan) orang, Golongan IV/a sebanyak 1 (satu), Golongan IV/b sebanyak 2 (dua) orang dan Golongan IV/c sebanyak 1 (satu)

orang. Jumlah Pejabat Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao sebanyak 7 (tujuh) pejabat terdiri atas 1 (satu) orang Eselon II/b yaitu Kepala Badan, 1 (satu) orang Eselon III/a yaitu Sekretaris Badan, 3 (tiga) orang Eselon III/b yaitu Kepala Bidang, 2 (dua) orang pejabat Eselon IV/a yaitu Kepala Sub Bagian sedangkan terdapat 3 (tiga) orang pejabat fungsional.

V. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam Penyusunan Program adalah Berpedoman pada Program-program rutin Kepegawaian yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan tetap mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024.

VI. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao terdiri atas :

1. Alat-alat angkutan berupa 1 (satu) unit mobil dan 12 (dua belas) unit Sepeda motor;
 2. Alat Kantor dan Rumah tangga sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) unit terdiri atas 15 (lima belas) jenis barang;
 3. Alat Studio dan Alat Komunikasi sebanyak 1 (satu) unit;
- Selanjutnya rincian sarana dan prasarana terlampir.

VII. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah :
1. Kurangnya Koordinasi dengan Lembaga lain sebagai mitra penyelenggara Kegiatan;
 2. Terbatasnya sarana penunjang pekerjaan;
 3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik kuantitas maupun kualitas.
- b. Untuk mengatasi permasalahan, maka solusi yang di ambil adalah :
1. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga lain sebagai mitra penyelenggara Kegiatan;
 2. Peningkatan/penambahan sarana pelaksanaan pekerjaan;
 3. Penambahan Aparatur/Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 4. Mengikutsertakan Aparatur pada Diklat Struktural, Fungsional maupun Substantif.

Baa, 17 Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Rote Ndao,



Meilon B. Sula, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660512 200604 1 022